

| PENERIMAAN PAJAK SEKTORAL |

KOMODITAS JADI JURU PENYELAMAT

Bisnis, JAKARTA — *Booming* harga komoditas menjadi kayuh utama pemerintah dalam memungut Pajak Penghasilan, sehingga mampu menembus target pajak yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

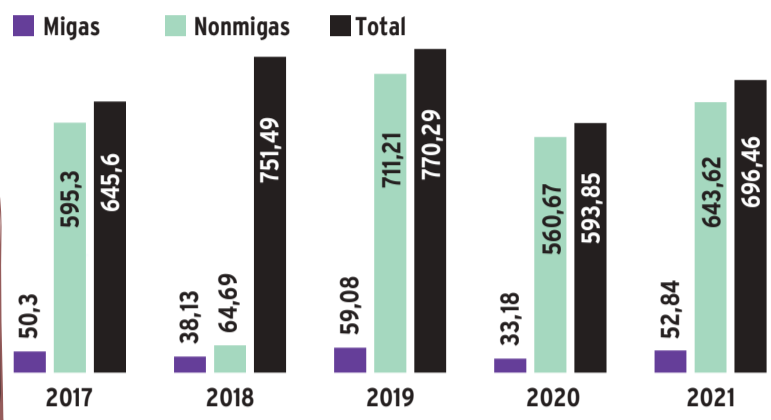
Tegar Arief
tegar.arief@bisnis.com

BERKAH SUMBER DAYA ALAM

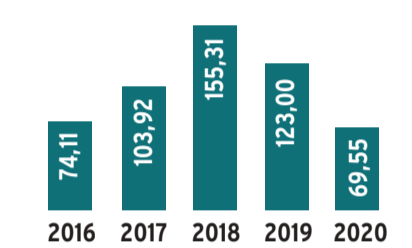
Booming harga komoditas lagi-lagi menjadi penyelamat penerimaan pajak dari hantu *shortfall*. Hal ini pula yang turut mengerek penerimaan negara melampaui target pada tahun lalu setelah selama 12 tahun terakhir selalu di bawah sasaran.



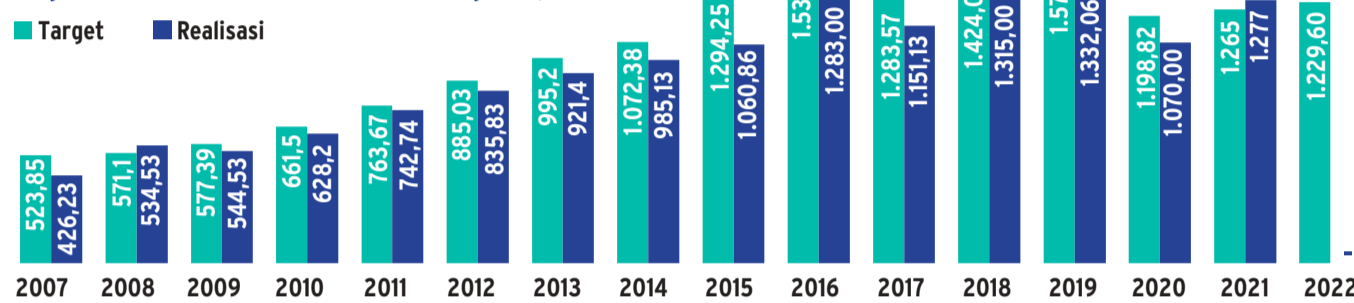
Penerimaan PPh Migas dan Nonmigas (Rp Triliun)



Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan dan Penggalian (Rp Triliun)



Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)



Realisasi APBN 2021

	Realisasi Sementara (Rp Triliun)	Pencapaian terhadap APBN (%)	Pertumbuhan (%)
A. Pendapatan Negara	2.003,10	114,9	21,6
I. Penerimaan Pajak	1.278	103,9	19,2
II. Kepabean dan Cukai	269	125,1	26,3
III. PNBPN	452	151,6	31,5
B. Belanja Negara	2.786,80	101,3	7,4
I. BPP	2.001,10	102,4	9,2
Belanja K/L	1.189,10	115,2	12,2
Belanja Non K/L	812	88	5
II. TKDD	785,7	98,8	3
C. Keseimbangan Primer	-440,1	69,5	-30,5
D. Surplus/Defisit	-783,7	77,9	-17,3
Persentase terhadap PDB	-4,65		
E. Pembiayaan Anggaran SILPA/(SIKPA)	868,6	86,3	-27,2
	84,9		

Sumber: Kementerian Keuangan

BISNIS/SINTA NOVIZAH

Pendorong Penerimaan Pajak 2021

- Pemulihan ekonomi nasional yang efektif
- Pemberian insentif untuk dunia usaha
- Tren kenaikan harga komoditas
- Komoditas juga mengerek penerimaan PNBPN SDA

Hal ini pula yang menjadi engsel utama dari loosnya otoritas fiskal dari hantu *shortfall* pajak yang terus membayangi selama 12 tahun terakhir.

Kementerian Keuangan mencatat, total penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari migas pada tahun lalu mencapai Rp52,84 triliun, melebihi hingga 59,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp33,18 triliun.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan *Bisnis*, jika tidak ada *booming* harga komoditas, penerimaan pajak sepanjang tahun lalu mencatatkan *shortfall* senilai Rp61,39 triliun.

Angka *shortfall* itu diperoleh dengan menggunakan data pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan yang pada 2021 sebesar 60,52%, dikalikan dengan realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan pada 2020 yang senilai Rp69,55 triliun, ditambahkan selisih PPh Migas antara 2021 dan 2020.

Dengan demikian, ditemukan

Beberapa komoditas yang menjadi objek pemungutan PPh 22 meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi.

shortfall penerimaan pajak Rp61,39 triliun. Alhasil, jika tidak mendapatkan momentum kenaikan harga komoditas penerimaan negara pada tahun lalu hanya berada di angka Rp1.216,11 triliun.

Hal ini pun diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa harga komoditas yang tinggi mampu mengerek penerimaan pajak.

Otoritas fiskal mencatat, penerimaan pajak dari sektor pertambangan melebihi dari minus 43,4% pada 2020 menjadi naik 60,52% pada tahun lalu akibat *moncer*-nya harga batu bara serta minyak dan gas (migas) sejak kuartal III/2021.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono mengatakan, komoditas memang menjadi pemacu utama penerimaan pajak yang pada tahun lalu cukup solid.

Booming harga komoditas menu-rutnya menambah kantong negara yang berasal dari PPh Pasal 22.

“Beberapa komoditas yang menjadi objek pemungutan PPh 22 meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi,” kata dia kepada *Bisnis*, Selasa (11/1).

Prianto menambahkan, *moncer*-nya harga komoditas pada paruh kedua tahun lalu juga mendorong industri pengolahan di sektor sumber daya alam (SDM) meningkatkan ekspor.

Hal ini lantas bermuara pada meningkatnya setoran dari wajib pajak korporasi yang cukup signifikan. “Industri ekspor SDA

juga lagi diuntungkan selama pandemi karena permintaan global meningkat sehingga omzet dan laba meningkat,” ujarnya.

Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, komoditas memang mendorong optimalisasi penerimaan pajak pada tahun lalu.

Hal ini tecermin dari terus menanjaknya kontribusi setoran negara dari sektor pertambangan kendati pemerintah kala itu cukup cemas lantaran besarnya efek varian Delta Covid-19.

Dia menambahkan, ada dua faktor lain yang mampu meng-ungkit kinerja pajak pada tahun lalu, yakni pemberian insentif yang teat sasaran serta pengawasan petugas pajak yang cukup optimal.

“Pemberian relaksasi pajak yang efektif dapat memberikan *multiplier effect* berupa penerimaan negara yang lebih besar,” kata dia.

Terlepas dari besarnya faktor *booming* harga komoditas untuk mengerek pajak, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa penyehatan fiskal pada 2021 merupakan hasil dari berbagai instrumen kebijakan yang disusun untuk merespons pandemi Covid-19.

Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Noor Faisal Achmad mengatakan realisasi APBN 2021 menguatkan optimisme pemerintah dalam melanjutkan pemulihan ekonomi pada tahun ini.

Menurutnya, tembusnya target penerimaan negara mengindikasikan bahwa iklim bisnis di dalam negeri telah pulih secara

tangguh, sehingga mendorong peningkatan kemampuan perusahaan dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Angka [penerimaan negara 2021] tersebut telah melewati angka psikologis dan melebihi target yang ditetapkan,” ujarnya. ■

| DAMPAK KEBIJAKAN THE FED |

Langkah Antisipatif Mendesak

Bisnis, JAKARTA — International Monetary Fund (IMF) menyarankan kepada pemangku kebijakan di negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menyiapkan berbagai mitigasi risiko dari pengetatan kebijakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

Kepala Divisi Kebijakan Makro IMF Stephan Danninger mengatakan, normalisasi kebijakan di AS yang terefleksi di dalam pemangkasan pembelian aset atau *tapering* hingga kenaikan suku bunga acuan lebih cepat menciptakan ketidakpastian di pasar negara berkembang.

“Perubahan ini telah membuat prospek pasar negara berkembang menjadi lebih tidak pasti. Negara-negara ini juga menghadapi inflasi yang meningkat dan utang publik yang jauh lebih tinggi,” kata dia, Selasa (11/1).

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi makin tinggi lantaran rata-rata utang pemerintah secara bruto di pasar negara berkembang naik hampir 10 poin persentase sejak 2019 atau sebelum pandemi Covid-19, yakni mencapai 64% dari produk domestik bruto (PDB) pada pengujung tahun lalu.

Oleh sebab itu, Danninger

menyarankan kepada pemerintah dan otoritas moneter untuk segera menyiapkan langkah antisipatif, di antaranya menahan lonjakan inflasi serta mengetatkan kebijakan moneter secara bertahap.

Selain itu juga memberikan berbagai stimulus kepada dunia usaha untuk menjaga ketangguhan dalam merespons perkembangan kebijakan di AS dan negara lainnya.

Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara terukur dalam rangka menjaga tingkat risiko.

“Memperluas dukungan untuk dunia usaha di luar kemampuan dapat meningkatkan risiko kredit dan melemahkan kesehatan keuangan jangka panjang,” ujarnya.

Danninger menambahkan, pemerintah perlu memperkuat kerangka kebijakan untuk mengurangi kerentanan ekonomi.

Adapun bank sentral disarankan untuk melakukan komunikasi mengenai pengetatan moneter untuk meminimalisasi daya kejut masyarakat dan pelaku pasar.

Tak hanya itu, lembaga tersebut juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan lindung nilai dengan tujuan memangkas risiko

akibat tingginya tingkat utang dalam mata uang asing.


“Untuk mengurangi risiko, jatuh tempo pembayaran utang harus diperpanjang bahkan jika itu meningkatkan biaya. Negara-negara yang berutang banyak juga perlu memulai penyesuaian fiskal lebih cepat,” jelasnya.

Dalam kaitan ini, Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Faisal Rachman menilai Indonesia memang menghadapi sejumlah tantangan berat memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19.

Selain *tapering* oleh The Fed, rintangan lain adalah meningkatnya kebutuhan impor, gangguan rantai pasok, dan sebaran Covid-19 yang menjadi risiko negatif.

Risiko lain bersumber dari proyeksi neraca keuangan Indonesia 2022 yang berasal dari gangguan rantai pasok dan meningkatnya tekanan inflasi, sehingga menyebabkan normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat.

Risiko tersebut berpotensi membayangi aliran modal asing untuk masuk ke pasar keuangan dalam negeri. “Ini tentunya bisa memicu *flight to quality* atau *risk-off sentiments*,” ujar Faisal. (Tegar Arief/Dany Saputra)



PT SIANTAR TOP TBK
("Perseroan")

PT SIANTAR TOP TBK
("Company")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SIANTAR TOP TBK

INVITATION
TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT SIANTAR TOP TBK

Dengan ini Direksi PT Siantar Top Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 3 Februari 2022
Pukul : 10.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – sampai selesai
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah Surabaya
60189

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

- Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
- Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan dilampirkan fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk pemegang saham berdasarkan hukum) dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran pada saat memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan KTUR yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, Jalan Tambak sawah 21-23 Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.

- Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib memberikan hasil PCR/Antigen Swab Test negatif pada H-1 sebelum dilaksanakan Rapat.
- Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat yang diidentifikasi dalam dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari terakhir sebelum pelaksanaan Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat.
- Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat akan dilakukan pada saat memasuki ruang pelaksanaan Rapat. Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat yang memiliki suhu tubuh di atas 37°C tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang pelaksanaan Rapat dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
- Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib menggunakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area pelaksanaan Rapat.
- Perseroan akan menyediakan hand sanitizer bagi Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat yang tersebar di beberapa area di sekitar ruang pelaksanaan Rapat.
- Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diharapkan tidak melakukan jabat tangan kepada sesama pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam pelaksanaan Rapat, petugas serta siapa pun yang hadir.
- Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
- Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya panggilan pada tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terkait informasi panggilan yang dibuat dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia ini, maka penanggalan dalam versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Hereby the Board of Directors of PT Siantar Top Tbk (the "Company") invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Tuesday, February 3rd, 2022
Time : 10.00 Western Indonesian Time ("WIB") – End
Venue : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah Surabaya
60189

With the Meeting agenda as follows:

- Change in the composition of the Company's management

Notes:

- The Company does not deliver separate invitations to each shareholder. This invitation is the official invitation to all shareholders of the Company.
- The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring a copy of their identity card or of a valid identity card and/or copy of the latest articles of associations (for shareholders in the form of legal entity) and submit such copies to the registration officer before entering the Meeting room. For the shareholders whose shares are registered in the collective deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), are requested to show the Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room.
- The shareholders eligible to attend the Meeting are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders ("DPS") of the Company on Tuesday, January 11th 2022 until 16:00 WIB and/or the shareholders of the Company in KSEI sub-accounts on Tuesday, January 11th 2022 until 16:00 WIB.
- For shareholders whose shares are registered in the collective custodian of KSEI, the Company will issue KTUR which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR in Securities Company or Custodian Bank where the shareholders opened their securities account.
- The shareholders, who are unable to attend, may be represented by their proxies by submitting a valid Power of Attorney, Directors, Board of Commissioners, and the employees of the Company may act as a proxy of the shareholders in the Meeting, but their vote as proxies during the Meeting will not be counted in the voting.

The form of the Power of Attorney can be obtained during business hour at the Company's office at Jalan Tambak sawah 21-23 Waru, Regency of Sidoarjo.

All power of the attorneys that have been signed must be received by the Board of Directors of the Company at the Company's office 3 (three) days prior to the date of the Meeting.

- Shareholders attending the Meeting shall submit their PCR/Antigen Swab Test negative result D-1 before the Meeting.
- Shareholders attending the Meeting who are identified to be coming and/or transiting from within the country or abroad in the last 7 (seven) days prior to the Meeting are not allowed to attend the Meeting.
- Body temperature checking to all shareholders attending the Meeting will be done when entering the Meeting room. Shareholders attending the Meeting whose body temperature is above 37°C are not allowed to attend the Meeting room and are advised to immediately check themselves in the nearest health facility.
- Shareholders attending the Meeting shall wear a mask during the Meeting and while in the Meeting area.
- The Company will provide hand sanitizer for shareholders attending the Meeting, located in several areas of the Meeting room.
- Shareholders attending the Meeting are expected not to shake hands with other shareholders, Board of Directors, Commissioners, and any person attending the Meeting.
- Shareholders attending the Meeting are expected to keep a safe distance with one another at minimum 1,5 meter.
- Materials of the Meeting agenda are available starting from the date of the invitation on January 12th, 2022 until the date the Meeting is held on February 3rd, 2022, according to the Company's information above.
- To ease and for the order of the Meeting, the shareholders or its proxies are requested to be presented at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
- In the event of a different interpretation regarding this invitation information made in English and Indonesian, the Indonesia language version of invitation shall prevail.

Sidoarjo, 12 Januari 2022
PT SIANTAR TOP Tbk

Direksi

Board Of Directors